

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA MANADO TAHUN 2004-2012

Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan,
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email: Spartakus333555@gmail.com*

ABSTRAK

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur keuangannya sendiri dengan tujuan untuk pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat menjadi yang utama. Sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan Kemiskinan pun menurun. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan dengan menggunakan variabel Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta dampaknya terhadap tingkat Kemiskinan di Kota Manado. Dengan metode analisis jalur (path analysis) Hasil penelitian ini adalah secara gabungan Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado, serta pengaruh, dan pengujian secara sendiri-sendiri pengaruh Dana Alokasi Umum dan belanja Langsung terhadap Kemiskinan memiliki pengaruh secara signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado, begitu pula dalam pengujian secara gabungan, dimana secara bersama-sama variabel Dana Alokasi umum, Belanja Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Kota Manado.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung, PDRB, dan Kemiskinan

ABSTRACT

Regional autonomy can be interpreted as the authority given to state regions to set up and manage their own affairs and public interests at the public's aspirations to improve the effectiveness and efficiency of governance in the context of service to the community in accordance with the development and implementation of legislation. Regional autonomy also provide authority to local governments in regulating his own financial with aim of regional development and public welfare be paramount. Thus increasing economic growth and poverty also decreased. To analyze the effect caused by variable loss of credit impact on economic growth and poverty by setting general allocation funds and direct expenditure. The purpose of this study is to determine how much influence the independent variable and the General Allocation Fund Direct Expenditure on Economic Growth and its impact on the level of poverty in the city of Manado. The results of this study are jointly General Allocation Fund and Direct Shopping does not affect the economic growth in the city of Manado, and influence, and independently testing the effect of general allocation funds and direct expenditure on Poverty has a significant effect in reducing the level of poverty in the city of Manado , as well as in overall testing, which together variable general allocation fund, Direct spending and Economic Growth has influence on Poverty in the city of Manado.

Keywords : General Allocation Fund, Jump Shopping, GDP, and Poverty

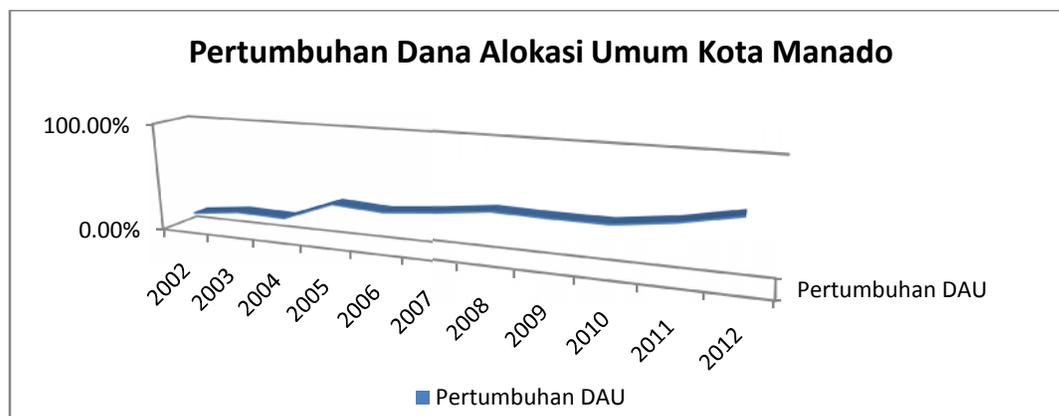
1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengurus rumah tangganya dengan mengurangi peran pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerahnya. Dalam UU tersebut menyebutkan dengan tegas bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya kedalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah (Nugroho, 2009).

Menurut Sipahutar (2013) otonomi daerah mengatur kebijakan pengelolaan Keuangan Negara yang semula sentralistik menjadi desentralisasi. Desentralisasi Fiskal di Indonesia dilakukan dengan pemberian diskresi belanja daerah yang luas dengan didukung oleh pendanaan transfer dari pusat ke Daerah. Amanat itu tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah. Desentralisasi fiskal diarahkan untuk mewujudkan alokasi sumber daya Nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel melalui instrumen yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengurangi horizontal imbalance, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

DAU yang merupakan general purpose grant atau block grants adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Diko, 2011). Dibawah ini merupakan gambaran pertumbuhan Dana Alokasi Umum yang ada di Kota Manado.



Gambar 1. Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kota Manado

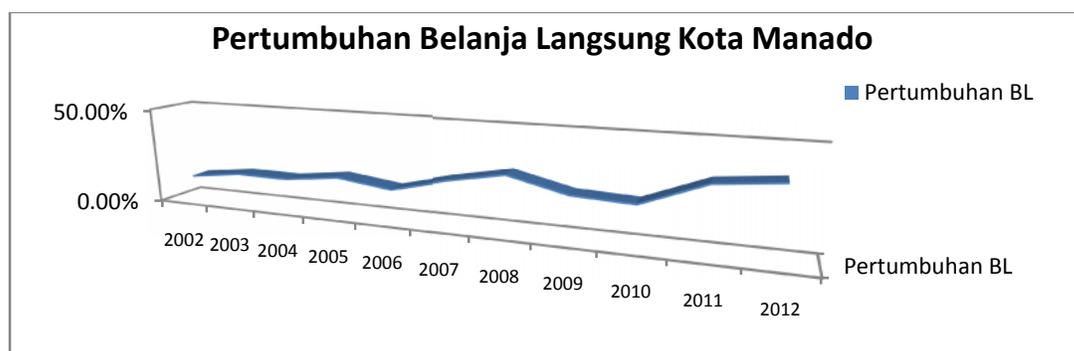
Jika dilihat pada gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah Kota Manado untuk digunakan dalam kegiatan pendanaan pembangunan dari tahun ke tahun tidak tetap seperti terlihat dari tahun 2001 sampai pada tahun 2012. Memberikan tren positif.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten/kota diperuntukan untuk pemerataan kemampuan keuangan dalam mendanai setiap kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan DAU juga perlu memperhatikan mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terserap dengan mekanisme pengelolaan yang tepat dan transparan. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, dikelola berdasarkan pendekatan kinerja yaitu pengelolaan anggaran yang mengutamakan pencapaian *output* dari alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan (Leode,2009).

Dalam pendanaan pembangunan daerah yang terstruktur terdapat Belanja yang dilakukan daerah untuk dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung (Try, 2011).

Vegirawaty, (2012) Menurut Permendagri No 13 tahun 2006, Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

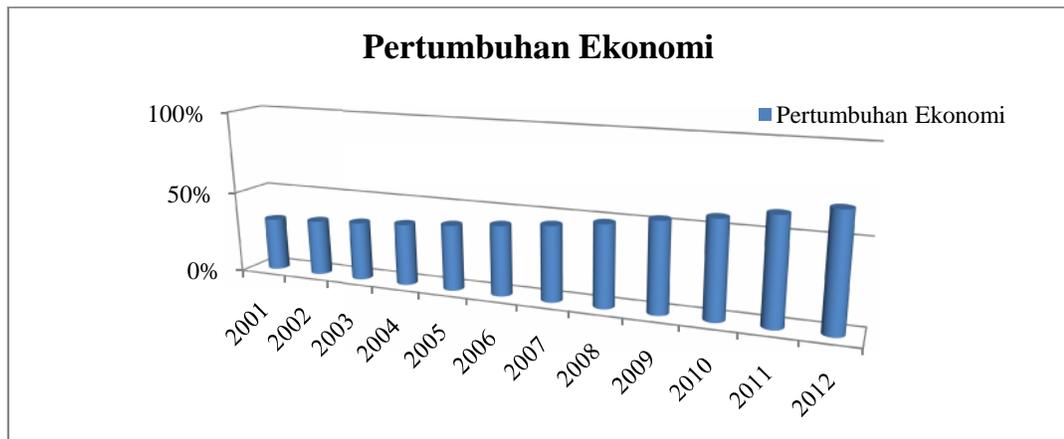
Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa; dan belanja modal. Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini pertumbuhan belanja Langsung Kota Manado



Gambar 2. Pertumbuhan Belanja Langsung Kota Manado

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan belanja Kota Manado memberikan tren positif. Belanja merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihidari dalam pembangunan suatu daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya pengelolaan dana yang baik dari Pemerintah daerah serta pengalokasian belanja yang tepat sasaran sehingga tujuan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dan tingkat kesejahteraan masyarakat pun ikut naik. Dan dengan ikut naiknya taraf kesejahteraan masyarakat sehingga akan berimbas pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi daerah . serta pemanfaatan belanja yang dilakukan pemerintah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, pemanfaatan sumber daya yang optimal, dan kualitas SDM semakin ditingkatkan. Hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk kepentingan publik.

Dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara/Daerah diketahui dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Setiap Negara/Daerah mempunyai kesempatan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi oleh kaerena faktor-faktor produksi bertambah dari satu periode ke periode lain, sehingga pendapatan Nasional/Daerah dapat ditingkatkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut : 1). Tanah dan kekayaan alam lainnya, 2). Jumlah dan kualitas dari penduduk dan tenaga kerja, 3). Barang-barang Modal dan Teknologi (Sukirno, 2004).



Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado

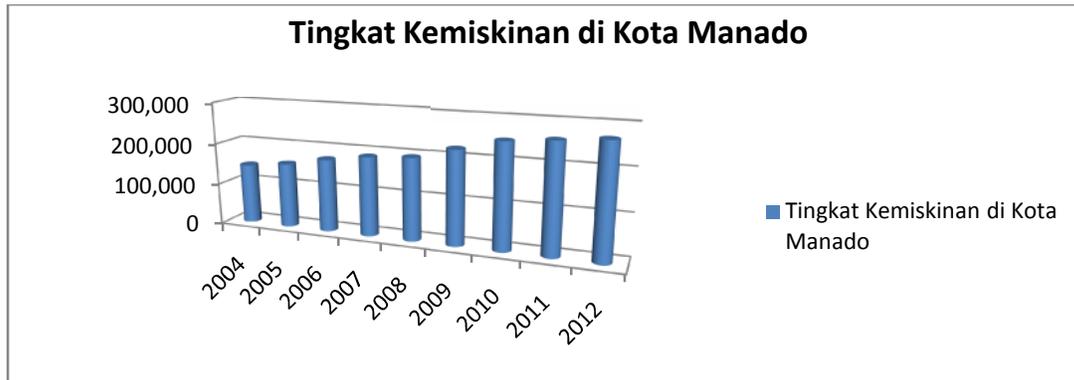
Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan Perekonomian Kota Manado terus meningkat dan memberikan tren positif.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana pembanguna yang dilakukan pemerintah daerah dapat tepat sasaran maka Pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Bila pertumbuhan ekonomi daerah meningkat maka tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga produktifitasnya pun semakin tinggi. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan pun akan turun.

Todaro dan Stephen C. Smith, (2006) juga mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil.

Dyah Arini, (2008) mengatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat dari tingginya tingkat pengangguran dalam suatu Negara atau Daerah tertentu. Akan tetapi kemiskinan tidak hanya diakibatkan oleh ketiadaan pekerjaan. Kondisi tersebut bisa juga terjadi karena kemalasan, ketidakmauan untuk bekerja keras yang hanya menunggu adanya pemberian dari orang lain. Selain itu persoalan kemiskinan juga terletak pada adanya ketidakpastian dari pemerintah yang memberikan janji-janji palsu untuk masyarakat awam. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Kemiskinan merupakan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Semua tingkat kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu: 1) pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya. 2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.



Gambar 4. tingkat Kemiskinan di Kota Manado

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam pengalokasian dana transfer dari pusat kepada pemerintah daerah yang begitu besar seharusnya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan tingkat kemiskinan di Kota Manado pun akan menurun. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado” mencari tahu seberapa besar pengaruh pengelolaan dana pemerintah yang nantinya berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado, Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Mengetahui pengaruh langsung Dana Alokasi Umum terhadap tingkat Kemiskinan di Kota Manado, serta

mengetahui pengaruh langsung Belanja Langsung terhadap Kemiskinan di kota Manado, Mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan

Setyowati dan Suparwati (2012) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Pengembangan Deskripsi Kasus Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), sedangkan DAU, DAK, PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), Dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) yang diporsikan dengan Belanja Modal (BM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Anis Setiyawati (2007) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran : Pendekatan Analisis jalur Untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel independen PAD, DAU, DAK terhadap variabel dependen Belanja Pembangunan berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap Kemiskinan dan pengangguran metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kuantitatif Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa PAD berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh Negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Untuk pengujian secara langsung Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dan Pengangguran berpengaruh menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap Pengangguran.

Try Indraningrum, (2011) melakukan penelitian yang berjudul Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Langsung (studi Pada Pemerintah Daerah Kabupataen/Kota Di Provinsi Jawa Tengah) penelitian ini untuk membuktikan secara Imperis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asosiatif Kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dengan variabel lainya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainya Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Hal tersebut berarti Pemerintah Daerah dapat memprediksi anggaran Belanja Langsung didasarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Nur Indah Rahmawati Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Jawa Tengah) Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara Emperis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan aloksao Belanja Daerah lebih dominan terhadap PAD dari pada DAU

Berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Otonomi Daerah diartikan sebagai hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia adalah tentang pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan Perundang-Undangan. Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud adalah kepala daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para Pejabat Perangkat Daerah. Dan dalam pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan harus berdasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji yang menerima/mengeluarkan uang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, serta obyek pendapatan (Admin,2010) Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah (Bab IV Pasal 16 No 3 UU Nomor 17 Tahun 2003).

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu bersumber dari Pendapatan hasil Pajak, hasil Retribusi Daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan. dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Menurut burhanuddin,(2010) mengatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005), dan dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil sebagai mana yang dimaksud berasal dari pajak dan sumber daya alam dimana.Dana Bagi Hasil yang berasal dari Pajak terdiri dari pajak bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) wajib pajak orang pribadi.

Dana Alokasi Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam Negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan Keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

Dana Alokasi khusus (DAK) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, serta mendanai kegiatan khusus yang diusulkan oleh daerah tertentu.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Dana hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang diberikan dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam Negeri atau luar Negeri.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

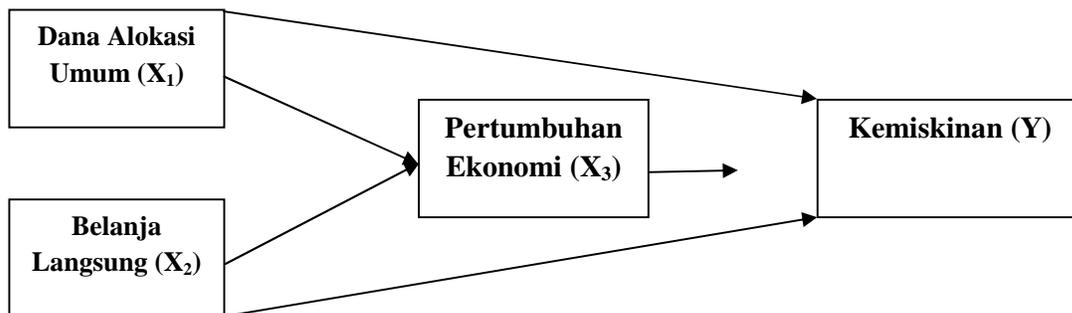
Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Negara, dan Belanja Tidak Terduga. Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai seperti alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik

Pembiayaan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan (SLIPA) tahun berjalan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Boediono (1992) mengatakan Pertumbuhan Ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan "output perkapita". Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Donderdag, 2013).

Tidak mudah untuk mendefenisikan kemiskinan, karena kemiskinan itu mengandung unsur ruang dan waktu (Maipita, 2013). Konsep kemiskinan pada zaman perang akan berbeda dengan konsep kemiskinan pada zaman merdeka dan moderen sekarang ini. Seseorang dikatakan miskin atau tidak miskin pada zaman penjajahan dahulu akan berbeda dengan saat ini. Demikian juga dari sisi tempat, konsep kemiskinan di Negara maju tentulah berbeda dengan konsep kemiskinan di Negara berkembang dan terkebelakang (Indra Maipita, 2013).



Gambar 4. Diagram Kerangka Pemikiran

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini juga merupakan hubungan kausal (causal effect), dimana penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan berdampak pada tingkat Kemiskinan di Kota Manado.

Untuk mendapatkan dan pengumpulan data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini diperoleh dari realisasi Dana Alokasi Umum Kota Manado, realisasi jumlah Belanja Langsung pemerintah Kota Manado, laporan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Manado, dan jumlah orang miskin di kota Manado yang di dapat dari perpustakaan Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara yang beralamat di Jln. 17 Agustus Manado dan mengakses situs badan pusat statistik yaitu www.bps.go.id.

Sugiyono (2001) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah jumlah dana alokasi umum, belanja langsung yang ada di Kota Manado. Pertumbuhan ekonomi yang pernah terjadi di Kota Manado, dan tingkat Kemiskinan di Kota Manado. Menurut Sugiyono (2001 : 60) nonprobability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi dana alokasi umum, belanja langsung, kondisi pertumbuhan ekonomi kota Manado dan tingkat kemiskinan di Kota Manado

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data sekunder yaitu dokumentasi dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pokok bahasan yang penulis kutip dari buku, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam arsip (data documenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan) yang berasal dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara mengenai jumlah Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, dan tingkat Kemiskinan di Kota Manado (periode 2004-2012).

Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis induktif atau analisis inferensia. Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang dana alokasi umum, belanja langsung, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kota Manado. Sedangkan analisis statistik inferensia adalah berupa regresi sederhana, regresi berganda dan analisis jalur (path analysis). Metode analisis Analisis jalur (path analysis) yaitu untuk mengetahui Pengaruh Variabel Independen Exogenous terhadap Variabel Dependen Endogenous.

Analisis Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. (Ghozali, 2007) <http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2373>

Definisi dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah memberikan pengertian terhadap suatu variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan peneliti untuk mengukur atau memanipulasinya, (Sularso, 2003)

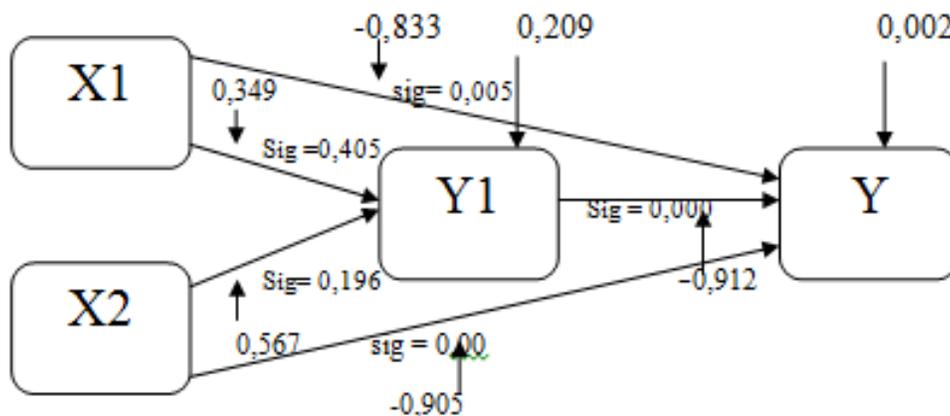
1. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dalam penelitian ini adalah realisasi DAU di Kota Manado, diukur dalam satuan jutaan rupiah.
2. Belanja langsung berasal dari Dana Alokasi Umum yang direalisasikan dalam bentuk belanja pembangunan daerah. belanja langsung dalam penelitian ini adalah realisasi Belanja langsung di Kota Manado, diukur dalam satuan jutaan rupiah
3. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Kota Manado yang di ukur dalam satuan persen . Untuk pertumbuhan ekonomi diukur pendapatan domestik regional bruto (PDRB) saat ini dikurangi dengan PDRB sebelumnya dibagi dengan PDRB saat ini.
4. Kemiskinan diukur dengan jumlah tingkat kemiskinan yang ada di Kota Manado.

Analisis Path

Teknik ini juga dikenal dengan model sebab-akibat (*causing modeling*). Penamaan ini didasarkan pada alasan bahwa analisis jalur memungkinkan pengguna dapat menguji proporsi teoritis mengenai hubungan sebab akibat tanpa memanipulasi variable-variabel. Memanipulasi variabel maksudnya ialah memberikan perlakuan (treatment) terhadap variabel-variabel tertentu dalam pengukurannya. Asumsi dasar dalam analisis ini ialah beberapa variable sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat dekat satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangannya saat ini path analysis diperluas dan diperdalam kedalam bentuk analisis “ structural equation modeling” atau dikenal dengan singkatan SEM

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian dan Pembahasan



Uji Intervening

Sub Struktur I

Y	= a + X1 + X2 + e1
Y	= 2,947 + 0,230 + 0,411
Stdr error	= 02,621+ 0.257 + 0.411
Beta	= 0 0.349 0.567
t-hitung	= 1,124 0,896 1.455
f-hitung	= 11,385
error term	= 1-R ²
	= 1-0.791
	=0.209

Sub Struktur II

Y	= a + X1 + e1
Y	= 16,708 + -0,577
Stdr error	= 2,862 + 0.145
Beta	= 0 -0.833
t-hitung	= 5.838 -3,985
f-hitung	= 15,879
error term	= 1-R ²
	= 1-0.818
	=0.182

Sub Struktur III

Y	= a + X2 + e1
Y	=18,607 + -0,691
Stdr error	= 2,369 + 0.123
Beta	= 0 -0,905
t-hitung	= 7,853 -5,615
f-hitung	= 31,526
error term	= 1-R ²
	= 1-0.818
	=0.182

Sub Struktur IV

Y	= a + X1 + X2 + X3 + e1
Y	= 21,566 + 0,104 + -0.182 + -0,960
Stdr error	= 0,294 + 0,028 + 0,034 + 0,042
Beta	= 0 0,150 -0.239 -0.912
t-hitung	= 73,352 3,723 -5,440 -23,066
f-hitung	= 1020,233
error term	= 1-R ²
	= 1-0,998
	=0.002

- **Pengaruh langsung Dana Alokasi Umum ke Kemiskinan**
= X1Y (-0,833)
- **Pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Umum ke Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi**
= (X1Y 0,150 x X2Y -0,239) = 0,035
- **Pengaruh total (Dana Alokasi Umum ke Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi)**
= X1Y (0,150) +(X1Y 0,150 x X3Y -0,912)
= 0,150 + -0,136
= 0,014
- **Pengaruh langsung Belanja Langsung ke Kemiskinan**
=X2Y (-0,239)
- **Pengaruh tidak langsung Belanja Langsung ke Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi**
= X2Y (-0,239) x X3Y (-0,912) = 0,217
- **Pengaruh total (Belanja Langsung ke Kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi)**
= X2Y (-0,239) + (X2Y (-0,239) x X3Y (-0,912)
= -0,293 + 0,217
= -0,022

$$Y1 = X1X3 (0,349) + e1 (0,209) = 0,558$$

$$Y1 = X2X3 (0,567) + e1 (0,209) = 0,776$$

$$Y = X1Y (0,150) + X3Y (-0,912) + e2 (0,002) = -0,76$$

$$Y = X2Y (-0,239) + X3Y (-0,912) + e2 (0,002) = -1,149$$

Hasil output SPSS memberikan nilai *standardized beta* Dana Alokasi Umum pada persamaan (1) sebesar 0,349 dan signifikan pada 0,405, dan nilai *standardized beta* Belanja Langsung adalah 0,567 dan Signifikan 0,196. yang berarti Dana Alokasi Umum dan belanja Langsung tidak mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi secara langsung dengan ditunjukkan Nilai koefisien *standardized beta* Dana Alokasi Umum (DAU) 0,349, dan Belanja Langsung 0,567 yang merupakan nilai path atau jalur sub struktur I.

Dari nilai *standardized Coefficients beta* dalam pengujian sub struktur II nilai *standardized coefficients* dana alokasi umum sebesar -0,833 dengan nilai signifikan sebesar 0,005 yang berarti variabel dana alokasi umum secara langsung berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado.

Dari Nilai *standardized beta* dalam pengujian sub struktur III nilai *standardized coefficients* belanja langsung terhadap kemiskinan adalah sebesar -0,905 dengan tingkat signifikan 0,001 yang berarti variabel belanja langsung secara langsung berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado.

Dari nilai *standardized beta* dalam pengujian sub struktur IV Dana Alokasi Umum 0,150 dengan nilai Signifikan 0,014, Belanja Langsung -0,239 dengan nilai Signifikan 0,003, dan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,912 dengan nilai signifikan 0,000, yang berarti variabel Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi secara gabung memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat Kemiskinan di Kota Manado.

Dari hasil analisis jalur diatas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, dan Belanja Langsung dapat berpengaruh langsung terhadap Kemiskinan, dan juga tidak langsung berpengaruh, melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening. Besarnya pengaruh langsung DAU terhadap Kemiskinan secara langsung sebesar -0,833 dan pengaruh tidak langsung DAU terhadap Kemiskinan adalah $-0,833 \times -0,912 = 0,759$, dan pengaruh langsung Belanja Langsung terhadap Kemiskinan sebesar -0,905 dan pengaruh tidak langsung terhadap Kemiskinan adalah $-0,905 \times -0,912 = 0,825$.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaruh Variabel Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara gabung tidak memiliki pengaruh.

Pengaruh Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan secara langsung memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado, dan pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan secara langsung memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Manado.

Dan secara gabungan antara variabel Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung dan pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat Kemiskinan di yang ada di Kota Manado

Saran

Bagi Pemerintah daerah untuk dapat memacu sektor-sektor pendapatan potensial serta membuka sektor-sektor perekonomian baru untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian di kota Manado, serta dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan sehingga potensi perekonomian yang ada di kota Manado dapat dimaksimalkan yang nantinya akan mengurangi tingkat kemiskinan di kota manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin,2010. Tentang Dana Perimbangan.
- Donderdag 02 Mei 2013 pengertian pertumbuhan ekonomi yang di kutib dari Boediono, 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta : BPF
- Indraningrum Try, 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang Pengerian belanja langsung <http://www.bimbingan.org/pengertian-belanja-langsung.htm>
- Leode Islamy, 2009 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU)
- Makruf Dikko Alrakhman, 2011. (Pentingnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Ssebagai Dana Perimbangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah)*Uncategorized*
- Maipita Indra Memahami “Konsep Kemiskinan Waspada Online Pusat berita & informasi medan sumut aceh”
- Mangasa Augustinus Sipahutar. 2013, (Desentralisasi Fiskal dan Perekonomian Daerah)
- Nugroho Suratno Putro,... Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Tengah (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 10 Tahun 2013 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2013.
- Sukirno, sadono. 2004. *Makro ekonomi*. Cetakan ke 5, edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sugiyono. (2001). *Statistika untuk Penelitain*. Bandung: Alfabeta.
- Vegirawati Titin, 2012. “Pengaruh Alokasi Belanja Langsung terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan) Universitas IBA Palembang
- <http://tutorialkuliah.blogspot.com/2010/01/pengertian-pendapatan-daerah.html>
- <http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2373>
- http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._MATEMATIKA/195909221983031-YAYA_SUKJAYA_KUSUMAH/Pengertian_Variabel_Penelitian.pdf
- www.bps.go.id